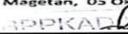


## Lampiran I. Bukti Surat Setoran Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jalan Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan Kode Pos 6331 Nomor Telp. (0351) 8198533		SURAT SETORAN Bulan : OKTOBER Tahun : 2023	
Rekening		Jumlah	
DENDA PAJAK DAERAH :		Rp. 32.170,00	
DENDA PAJAK HOTEL		Rp. 5.000,00	
DENDA PAJAK RUMAH PENGINAPAN / LOSMEN		Rp. 8.000,00	
DENDA PAJAK KATERING		Rp. 5.370,00	
DENDA PAJAK RESTORAN		Rp. 13.000,00	
(TGL 05 OKTOBER 2023)		Rp. 32.170,00	
<b>J U M L A H</b>			
Dengan Huruf :		tiga puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah	
Magetan, 05 Oktober 2023 			
MODEL : DPD II - 20		Kantor <b>jatim</b> MAGETAN	

 Diunduh dengan QRScanner

## Lampiran II. Surat Teguran Pajak Hotel

 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan, Telp. (0351) 8198533	
Magetan, 05 Oktober 2023 Kepada Yth. [Redacted] [Redacted] [Redacted]	
SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD [Redacted]	
[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]	[Redacted] [Redacted] [Redacted] [Redacted]
Berdasarkan catatan kami ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen ke BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN yaitu:	
- SPTPD dan data Pendukung periode - Jenis Pajak	: 01-08-2023 s/d 31-08-2023 : Pajak Hotel
Selanjutnya agar saudara segera menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen pendukung paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima. Keterlambatan dalam penyampaian SPTPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% sebulan dari pokok ketetapan.	
Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.	
Magetan, 05 Oktober 2023 KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN  ( MARYUNANI YULIANA, SE ) NIP. 19710725 199803 2 007	

### Lampiran III. Alur Pembayaran Pajak Hotel di BPKPD Kabupaten Magetan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan	Bank/ Pihak yang ditunjuk	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Wajib Pajak menghitung sendiri pajak yang terutang dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk satu masa pajak				SPTPD	5 menit	SPTPD	
2	Petugas pelayanan menginput data dan mencetak kode bayar untuk diserahkan kepada wajib pajak					SPTPD	5 menit	SPTPD, Kode bayar
3	Wajib pajak menerima kode bayar				kode bayar	5 menit	kode bayar	
4	Wajib pajak membayar pajak daerah menggunakan kode bayar				kode bayar	5 menit	kode bayar	
5	Wajib pajak memperoleh bukti bayar				kode bayar	5 menit	bukti bayar	

Dipindai dengan CamScanner

### Lampiran IV Hasil Wawancara di Bpkpd Kabupaten Magetan dengan Karyawan

#### a. Dokumentasi Wawancara Oleh Bidang Pendataan



Lampiran : Wawancara Kabid BPKPD Kabupaten Magetan

Narasumber : Kepala Bidang Pendataan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pengumpulan data hotel yang terdaftar di Kabupaten Magetan dilakukan di Dinas BPKPD?	Proses pengumpulan data hotel di Kabupaten Magetan dilakukan oleh Dinas BPKPD melalui berbagai cara. Kami melakukan pendataan lapangan langsung dengan turun mendata serta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan hotel-hotel baru.
2.	Bagaimana caranya Kantor BPKPD memastikan bahwa data yang mereka miliki tentang hotel dan pajaknya benar-benar akurat dan terkini di bagian pendataan?	Data hotel dan pajaknya diklasifikasikan secara sistematis. Kami juga melakukan survei lapangan setiap minggu untuk memastikan bahwa data yang kami miliki selalu akurat dan terkini.
3.	Bagaimana Kantor BPKPD memanfaatkan teknologi atau sistem informasi dalam mengelola dan memperbarui data hotel seperti perubahan kepemilikan?	Kantor BPKPD memanfaatkan teknologi dan sistem informasi dengan mengintegrasikan data dari BPHTB setiap kali ada proses balik nama. Kami juga menerima laporan langsung dari hotel jika terjadi perubahan kepemilikan, potensi

		kamar, penambahan perlengkapan, dan lainnya.
4.	Bagaimana Kantor BPKPD menangani data hotel yang baru saja beroperasi atau baru terdaftar, dan bagaimana proses pendataan awal tersebut dilakukan?	Untuk hotel yang baru beroperasi atau baru terdaftar, kami melakukan kunjungan langsung ke lokasi. Kami mendata informasi kepemilikan, jumlah kamar, dan tarif yang berlaku untuk memastikan pendataan awal yang akurat.
5.	Apakah ada audit internal yang dilakukan oleh tim pendataan untuk memastikan bahwa data hotel yang ada selalu akurat dan lengkap? Jika ya, bagaimana proses audit tersebut?	Ya, ada audit internal yang dilakukan oleh tim pendataan. Kami melakukan self-assessment untuk WP (Wajib Pajak) hotel, di mana WP melaporkan dan menghitung sendiri pajaknya serta melakukan pembayaran. Namun, seringkali ada WP yang mencoba mengurangi jumlah pajak yang dibayar meskipun hotelnya ramai. Oleh karena itu, kami melakukan pemeriksaan dengan meminta data keuangan bulanan sebagai langkah awal, serta melakukan survei lapangan untuk memastikan keakuratan data.

## b. Dokumentasi Wawancara Oleh Bidang Penagihan



Lampiran : Wawancara Kabid BPKPD Kabupaten Magetan

Narasumber : Sekretaris Bidang Penagihan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses penagihan pajak hotel yang terdaftar tetapi belum membayar kewajiban pajaknya di Dinas BPKPD?	Proses penagihan pajak hotel yang terdaftar tetapi belum membayar kewajiban pajaknya dimulai dengan pengiriman Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). STPD dikirim kepada hotel yang belum membayar pajak sebagai pengingat dan untuk memberi tahu jumlah pajak yang terutang beserta denda yang mungkin dikenakan. Jika hotel masih tidak membayar setelah

		<p>menerima STPD, langkah berikutnya adalah menghubungi pihak hotel melalui telepon atau surat resmi. Jika masih belum ada pembayaran, Dinas BPKPD dapat melakukan kunjungan langsung ke hotel untuk melakukan penagihan.</p>
2.	<p>Bagaimana komunikasi antara Dinas BPKPD dan hotel yang belum membayar pajak dilakukan, dan apa upaya yang dilakukan untuk mendorong mereka agar membayar kewajiban pajak mereka tepat waktu?</p>	<p>Komunikasi antara Dinas BPKPD dan hotel yang belum membayar pajak dilakukan melalui beberapa cara, termasuk pengiriman surat resmi, panggilan telepon, dan kunjungan langsung ke hotel. Upaya tambahan yang dilakukan untuk mendorong pembayaran tepat waktu termasuk pemberian sosialisasi tentang pentingnya pembayaran pajak, pengingat berkala melalui telepon atau pesan teks, serta penawaran skema pembayaran angsuran bagi hotel yang mengalami kesulitan keuangan. Kami juga bekerja sama dengan komunitas</p>

		Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota mereka.
3.	Apakah ada strategi khusus yang diterapkan untuk menangani hotel yang enggan atau tidak mampu membayar pajak mereka?	Untuk hotel yang enggan atau tidak mampu membayar pajak, Dinas BPKPD memberikan tambahan waktu pembayaran. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada hotel agar dapat memenuhi kewajiban pajak mereka. Kami juga memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan sanksi yang mungkin dikenakan jika mereka tidak membayar tepat waktu. Selain itu, kami mengadakan pertemuan dengan pemilik hotel melalui forum PHRI untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama.
4.	Bagaimana Dinas BPKPD menangani hotel-hotel yang memiliki tunggakan pajak dalam jangka waktu yang	Saat ini, hotel-hotel di Magetan tidak memiliki tunggakan pajak yang signifikan karena belum ada sanksi hukum yang diterapkan. Tunggakan

	<p>lama? Apakah ada tindakan hukum atau sanksi yang diterapkan?</p>	<p>hanya dicatat di kantor Dinas BPKPD dan biasanya terkait dengan PBB, reklame, dan PAT. Tindakan yang diambil lebih bersifat administratif dan bertujuan untuk mengingatkan dan mendorong hotel membayar pajak. Upaya yang dilakukan termasuk pengiriman surat peringatan dan kunjungan langsung untuk membahas masalah pembayaran pajak dengan manajemen hotel.</p>
--	---	--

## RIWAYAT HIDUP



Nurhandayani dilahirkan di Kabupaten Magetan 03 - Januari - 2002, putri ketiga dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Sutarno dan Ibu Sunarti. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di Kabupaten Magetan. Tamat SDN Maoaspati 2 Kabupaten Magetan pada tahun 2015, SMP Negeri 3 Maospati Kabupaten Magetan pada tahun 2018 dan lulus SMA Negeri 1 Sukomoro Kabupaten Magetan tahun 2021. Jenjang pendidikan berikutnya ditempuh pada Program Studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Semasa Mahasiswa aktif dalam Organisasi kemahasiswaan diantaranya adalah anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) TAXCTA pada tahun 2021 dan Unit Kegiatan Mahasiswa Islam Indonesia (UKII) pada tahun 2022. Saya juga menjadi relawan pajak selama dua periode berturut-turut, yaitu pada tahun 2022-2023.